

**PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
(UNHCR) TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PENGUNGSI DI
INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT**

Nama : Rr. Marlitya Dwi Aldira Putri

Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Pembimbing :

1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
2. Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Jumlah pengungsi yang terus meningkat setiap tahunnya berpotensi menimbulkan kerugian kepada Indonesia sebagai negara transit. Para pengungsi tidak memerhatikan tempat atau negara dimana ia ditampung. Beberapa dari mereka mengetahui ancaman hukum atas tindakan yang dilakukannya namun tetap melakukan kejahatan. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari UNHCR. Indonesia belum menjadi Negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Meskipun hanya sebagai negara transit, Indonesia tetap harus memenuhi kebutuhan hidup para pengungsi dan memperlakukannya secara manusiawi. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu pendekatan secara *statute approach* dan pendekatan secara *conceptual approach*.

Kata kunci: *UNHCR, Pengungsi, Negara Transit*

**THE ROLE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR
REFUGEES (UNHCR) AGAINST THE CRIMES PERFORMED OF
REFUGEES IN INDONESIA AS A TRANSIT COUNTRY**

Name : Rr. Marlitya Dwi Aldira Putri

Discipline / Study Program : Legal Studies / Law

Contributor :

1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
2. Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.

ABSTRACT

The number of refugees that continues to increase every year has the potential to cause losses to Indonesia as a transit country. Refugees do not pay attention to the place or country where they are accommodated. Some of them know the legal threat of their actions but still commit crimes. This can happen because of the lack of attention and supervision from UNHCR. Indonesia has not yet become a state party to the 1951 Convention and 1967 Protocol, so the government has given authority to UNHCR to carry out its mandate in dealing with refugee problems in Indonesia. Even though it is only a transit country, Indonesia still has to meet the needs of refugees and treat them humanely. The type of research used is normative juridical research. The problem approach in this writing is carried out using 2 (two) ways, namely a statute approach and a conceptual approach.

Keywords: *UNHCR, Refugees, Country of Transit*